



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LIS DWI RAHMAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 425520

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.012.792.000

1. Tanah Seluas 432 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 265.248.000
2. Tanah Seluas 923 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/224 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/100 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 422.104.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 434.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 246.250.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 173.560.944

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.866.602.944

**III. HUTANG**

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.866.602.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.